

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan rangkaian ribuan pulau di sekitar khatulistiwa yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Itulah sebabnya Indonesia dijuluki sebagai Nusantara, yang berarti pulau-pulau yang bertebaran. Secara sosial budaya, kondisi Indonesia merupakan negeri dengan berbagai kultur maupun sistem sosial yang beraneka ragam. Penduduk Indonesia berasal dari berbagai macam ras maupun suku bangsa, memiliki agama, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Mereka menempati bagian-bagian daerah dengan tingkat sosial ekonomi serta tingkat kesejahteraan yang berbeda. Selain itu, masih lebih banyak lagi perbedaan atau kebinekaan dari bangsa ini.

Su'ud (2006:3) mengatakan "konsep kebhinekaan dikenal sebagai modal dasar bangsa Indonesia yang multikultural". Sebagai modal kondisi objektif itu dapat menguntungkan (*constructive*), namun dapat pula merugikan (*destructive*) seperti etnosentrisme, fanatisme, berbagai interes atau kepentingan (kepentingan politik, materi serta kelompok). Sikap mental *destructive* sangat membahayakan semangat atau cita-cita persatuan bangsa maupun integrasi sosial. Berbagai kondisi yang *destructive* tersebut akan menjadi masalah sosial karena cenderung melebar ke aspek-aspek kehidupan nasional yang lain seperti pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang merusak tatanan sosial yang integratif. Kondisi ini dapat berupa munculnya berbagai macam konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal sehingga menimbulkan gangguan terhadap

ketahanan bangsa dan negara. Sebagai contoh, konflik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah terjadi sejak masa DI/TII yang dipimpin oleh Muhammad Daud Beureueh (1953-1959), berlanjut lagi selama 30 tahun dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro (4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005) yang diperparah dengan berlakunya status Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989-1998. Konflik ini telah mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa, harta benda, hancurnya sumber-sumber ekonomi rakyat, rusaknya fasilitas pendidikan, disharmonisasi kehidupan sosial, dan melemahnya semangat persatuan dan kebersamaan sehingga mengarah pada disintegrasi sosial. Dengan demikian demi keutuhan negara, tugas bangsa ini adalah melakukan berbagai upaya proses reintegrasi sosial dalam rangka mewujudkan kondisi damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dari masa pemerintah Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrachman Wahid, Presiden Megawati dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menerapkan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Dari berbagai upaya damai yang telah rintis selama kurun waktu tiga dasawarsa, akhirnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemukan titik terang. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang merupakan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari senin tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki ibu kota Finlandia merupakan *entry point*

untuk mencapai Aceh yang damai, adil, aman dan bermartabat. Untuk maksud tersebut Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah di Aceh,
2. Hak-Hak Asasi Manusia,
3. Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat,
4. Pengaturan Keamanan,
5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh,
6. Penyelesaian perselisihan.

Salah satu tugas pokok pasca MoU melakukan proses reintegrasi, yaitu menyatukan kembali berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam draf panduan reintegrasi yang dikeluarkan *UN Disarmament Demobilization & Reintegration Working Group* (UN DDR WG) menyatakan bahwa satu tantangan utama yang dihadapi para mantan panglima perang dan gerilyawan adalah kadangkala mereka tidak mungkin melakukan reintegrasi ketempat asal. Setelah puluhan tahun berperang, mereka tidak tahu harus menapak langkah kemana atau takut distigmatisasi lantaran kegiatan mereka dimasa lalu (Aceh Magazine, 2006: 6-7). Untuk menyelesaikan persoalan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membuat program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengimplementasikan program reintegrasi. Bappenas memadukan dan menyelaraskan kerangka upaya rehabilitasi dan rekontruksi (pasca gempa dan tsunami) dengan kerangka upaya reintegrasi (pasca MoU). Dengan program yang digulirkan itu diharapkan mantan GAM merasa diperlakukan secara adil, mandiri secara ekonomi, dan dapat berintegrasi dengan masyarakat. Dengan demikian, proses reintegrasi sangat penting untuk mengembalikan Aceh pada kondisi yang kondusif, yang dapat melahirkan kebebasan bagi masyarakat untuk bekerja, berkarya, dan mengejar cita-cita. Masyarakat Aceh tidak mungkin dapat

berpartisipasi secara bersama dalam upaya membangun bangsa (*nation building*) apabila selamanya berada dalam konflik. Oleh karena itu membutuhkan upaya-upaya untuk pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada sistem pendidikan dunia di era globalisasi disebutkan bahwa salah satu pilar pembelajaran adalah *learning to live together*. Dalam aspek ini diharapkan bahwa pembelajaran tidak hanya cukup diberikan dalam bentuk keterampilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga keterampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan hidup dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dengan semangat kebersamaan dan kesejajaran. Dalam konteks Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Salah satu bidang ilmu yang menarik perhatian pada persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan dalam upaya menjaga integrasi bangsa adalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Tujuan PIPS adalah mempersiapkan para pelajar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Sehubungan dengan pembelajaran PIPS, semua paham maupun konsep yang bertentangan dengan proses reintegrasi dalam upaya menciptakan kondisi damai dapat menghambat pencapaian tujuan PIPS. Sikap tersebut dapat berupa eksklusivisme, anarkisme,

dan fanatisme. Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian tujuan PIPS dalam proses reintegrasi sosial yaitu understanding, interaksi/komunikasi, kerjasama, partisipasi, toleransi, keamanan, keadilan dan kebenaran, kebebasan, kesejahteraan, serta keutuhan/harmoni.

Sehubungan dengan upaya penyelesaian konflik di Aceh, adanya program reintegrasi diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kerjasama, partisipasi, toleransi, keamanan dan berbagai modal sosial lainnya yang dapat mempersatukan masyarakat menuju Aceh yang Damai dan bermartabat. Sebagai tahap awal, program reintegrasi lebih diprioritaskan pada daerah rawan konflik seperti yang pernah dilaksanakan pada desa Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Tanoh Mirah adalah desa terpencil yang masuk dalam kategori zona hitam (daerah rawan konflik). Menurut Serambi Indonesia (16 Februari 2006) kondisi kehidupan masyarakat setempat didera penderitaan dan sangat memprihatinkan mengenai kondisi sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses reintegrasi sosial dan mendeskripsikan dalam suatu tesis yang berjudul **“Reintegrasi Sosial Pasca Perjanjian Damai Pemerintah RI-GAM (Studi Pada Masyarakat Tanoh Mirah Kabupaten Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam)”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalah adalah proses reintegrasi sosial dalam upaya mewujudkan kondisi damai. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana proses reintegrasi sosial masyarakat Tanah Mirah sebelum perjanjian damai pemerintah RI dengan GAM?
2. Bagaimana proses reintegrasi sosial masyarakat Tanah Mirah setelah perjanjian damai pemerintah RI dengan GAM?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Proses reintegrasi sosial masyarakat Tanah Mirah sebelum perjanjian damai pemerintah RI dengan GAM.
2. Proses reintegrasi sosial masyarakat Tanah Mirah setelah perjanjian damai pemerintah RI dengan GAM.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, melengkapi kajian ilmiah dalam bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya mengenai reintegrasi sosial.
2. Secara praktis, sumbangan pikiran dan masukan bagi pemerintahan daerah setempat dalam upaya reintegrasi sosial untuk mewujudkan Aceh damai.